

USULAN
PROGRAM *ACADEMIC LEADERSHIP GRANT*
(PROGRAM 1-1-6)



JUDUL PENELITIAN :
REKONSTRUKSI PRAKTIK DEMOKRASI DALAM MENCAPAI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JAWA BARAT

TIM PENGUSUL:

Prof. Dr. Dede Mariana, Drs., M.Si.	0013036303
Mudiyati Rahmatunnisa, Dra., M.A., Ph.D.	0009056902
Ida Widianingsih, S.IP., M.A., Ph.D	0015067116
Binahayati Rusyidi, S.Sos., M.S.W., Ph.D.	0017106802
Dr. Rahman Mulyawan, Drs., M.A.	0020106703
Dr. Diah Fatma Sjoraida, S.E., M.Si.	0006077109
Dr. Suwandi Sumartias, Drs., M.Si.	0014076509

UNIVERSITAS PADJADJARAN

2015

HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM *ACADEMIC LEADERSHIP GRANT*
(PROGRAM 1-1-6)

Judul	: REKONSTRUKSI PRAKTIK DEMOKRASI DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JAWA BARAT
Pilar/Common Goals Jabar	Kebijakan, Budaya, dan Informasi/Isu Pemerintahan dan Profesionalisme Pelayanan Publik (CG 1, CG 2, CG 8, CG 9, dan CG 10)
Peneliti/Pelaksana	:
Ketua Tim Peneliti	:
Nama Lengkap	: Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si
NIDN/NIP	: 0013036303/1963.0313.1988.0310.01
Jabatan Fungsional	: Guru Besar
Departemen/Fakultas	: Ilmu Pemerintahan - Ilmu Politik/FISIP
Nomor HP	: 08112331363
Alamat Surel (e-mail)	: dedemariana@yahoo.com
Anggota Tim Peneliti	:
Anggota Peneliti (1)	:
Nama Lengkap	: Mudiyati Rahmatunnisa, Dra., M.A., Ph.D
NIDN/NIP	: 0009056902/19690509 199403 2001
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Departemen/Fakultas	: Ilmu Politik/FISIP
Nomor HP	: 081223693234
Alamat Surel (e-mail)	: mudiyati@yahoo.com mudiyati.rahmatunnisa@unpad.ac.id
Anggota Peneliti (2)	:
Nama Lengkap	: Ida Widianingsih, Dra., M.A., Ph.D
NIDN/NIP	: 0015067116/19710615 199903 2 001
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Departemen/Fakultas	: Administrasi Publik/FISIP
Nomor HP	: 081214558454
Alamat Surel (e-mail)	: Ida.widianingsih@unpad.ac.id idawd@yahoo.com
Anggota Peneliti (3)	:
Nama Lengkap	: Dr. Rachman Mulyawan, Drs., M.A
NIDN/NIP	: 0020106703 / 19671020 199302 1 001
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Departemen/Fakultas	: Ilmu Pemerintahan/FISIP
Nomor HP	: 081312004083
Alamat Surel (e-mail)	: rahmanmulyawan@yahoo.com

Anggota Peneliti (4) :
Nama Lengkap : Binahayati, Dra., M.A., Ph.D
NIDN/NIP : 0017106802/196810171994032002
Jabatan Fungsional : Lektor
Departemen/Fakultas : Kesejahteraan Sosial/FISIP
Nomor HP : 082120112828
Alamat Surel (e-mail) : titinamaku2012@gmail.com

Anggota Peneliti (5) :
Nama Lengkap : Dr. Diah Fatma Sjoraida, S.E., M.Si
NIDN/NIP : 00060777109 / 19710706 200604 2001
Jabatan Fungsional : Lektor
Departemen/Fakultas : Hubungan Masyarakat/FIKOM
Nomor HP : 0811226772
Alamat Surel (e-mail) : dfz671@gmail.com

Anggota Peneliti (6) :
Nama Lengkap : Dr. Suwandi Sumartias, Drs., M.Si
NIDN/NIP : 0014076509 / 196207141988031019
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Departemen/Fakultas : Hubungan Masyarakat/FIKOM
Nomor HP : 087825968208
Alamat Surel (e-mail) : wandi_sumartias@yahoo.com
Lama Penelitian :
Keseluruhan : 4 (empat) tahun
Penelitian Tahun Ke : 1 (satu)
Biaya Penelitian : 1 (satu) Milyar
Keseluruhan :
Biaya tahun berjalan : Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Diusulkan ke Unpad : Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Dana institusi lain : Rp -
Inkind, sebutkan : Pemprov Jabar (ketersediaan data pembangunan)

Bandung, Mei 2015

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran,

Ketua Tim Peneliti,

Dr. Arry Bainus, Drs., M.A
NIP. 1961.0627.1990.0110.01

Prof. Dr. Dede Mariana, Drs., M.Si
NIP. 1963.0313.1988.0310.01

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	4
Ringkasan	5
 BAB I PENDAHULUAN	 6
1.1. Latar Belakang Penelitian	6
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 14
2.1. Desentralisasi dan Demokrasi dalam Pembangunan	14
2.2. Demokrasi dan Kesejahteraan Daerah	16
2.3. Kerangka Pemikiran	19
2.4. Proposisi Penelitian	21
 BAB III METODE PENELITIAN	 22
3.1. Desain Penelitian	22
3.2. Unit Analisis	22
3.3. Teknik Pengumpulan Data	23
3.4. Teknik Analisis dan Pengujian Keabsahan Data	23
 BAB IV BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN	 24
4.1. Anggaran Biaya	24
4.2. Jadwal Penelitian	25
 Daftar Pustaka	 25

Ringkasan

Demokratisasi pembangunan yang diawali sejak 1980 dan dekade 1990an mendorong diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi di dalam pengelolaan pembangunan. Politik desentralisasi dalam pengelolaan pembangunan merupakan wujud kongkret dari demokratisasi pembangunan yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Konsekuensinya, aktor dan lokus pembangunan yang semula terpusat menjadi terpencar ke berbagai daerah otonom provinsi maupun kabupaten/kota.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia, telah menjalankan praktik demokrasi di dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Meski demikian, demokrasi yang dijalankan tampaknya belum membuahkan kesejahteraan secara merata dan berkelanjutan bagi warga Jawa Barat. Karena itu, praktik demokrasi harus direkonstruksi kembali agar mampu melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana pelaksanaan demokrasi di Jawa Barat; (2) bagaimana hasil-hasil pelaksanaan demokrasi dan kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat; (3) bagaimana peran demokrasi terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Barat; (4) bagaimana rekonstruksi praktik demokrasi dan kesejahteraan yang harus dibangun agar dapat mewujudkan kesejahteraan di Jawa Barat.

Metode yang digunakan ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha menjelaskan (eksplanasi) secara rinci dan melakukan analisis mendalam terkait kemampuan Pemprov Jabar dan penguatan kelembagaan lokal dalam mewujudkan kesejahteraan di daerah. Penggunaan metode penelitian kualitatif dianggap tepat karena menggunakan kekuatan nalar atas fenomena empirik yang tidak hanya melihat dari satu faktor, namun melibatkan banyak faktor yang dapat menjelaskan berbagai hal mengenai terbentuknya kesejahteraan di daerah.

Berdasarkan hasil telaah teoritik dan kerangka pemikiran yang dibangun, maka proposisi pada penelitian ini adalah : (1) pelaksanaan demokrasi di Jawa Barat dapat diukur dari terbangunnya koalisi kelompok kepentingan dan komitmen politik yang menjamin perluasan partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintahan dan pembangunan; (2) hasil-hasil demokrasi dan kesejahteraan dapat dilihat dari perluasan partisipasi publik dan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, melaksanakan pembangunan dan pelayanan public yang akuntabel; (3) demokrasi berdampak pada kesejahteraan apabila masyarakat dapat mengakses pelayanan publik dan merasakan hasil-hasil pembangunan secara adil dan merata; (4) gagasan praktik demokrasi dan kesejahteraan dapat dibangun kembali (rekonstruksi) melalui penguatan empat dimensi ekonomi, pemerintahan, politik dan budaya untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Wacana pembangunan pada awalnya merupakan konsep yang netral, sebagai upaya manusia untuk melakukan berbagai perubahan menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Pemaknaan ini kemudian berubah menjadi suatu ideologi manakala berbagai kepentingan kemudian melandasi arah dan cara untuk mencapai perubahan dan kesejahteraan tersebut. Pada praktiknya, pembangunan kemudian menjadi sesuatu yang tidak netral, tetapi sangat ditentukan oleh paradigma berpikir yang melandasinya. Dari sinilah kemudian lahir berbagai model pembangunan, mulai dari yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi hingga yang berfokus pada keseimbangan lingkungan hidup sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (Mariana, 2007).

Pada pertengahan 1980-an hingga dekade 1990-an yang merupakan dekade studi demokratisasi, model pembangunan mulai menerapkan prinsip demokratisasi. Pada level lokal, demokratisasi pembangunan diterjemahkan dalam konsep politik desentralisasi, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, dan pelimpahan urusan dari pemerintah kepada unsur-unsur non pemerintah (Rondinelli, 1981). Melalui desentralisasi, daerah menikmati keleluasaan merencanakan dan melaksanakan pembangunan, menikmati keragaman lokal, dan pesta demokrasi lokal. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, daerah sibuk melakukan penataan kelembagaan secara internal. Pada saat yang sama, pemerintah daerah menghadapi harapan dan tuntutan masyarakat awam yang mempertanyakan dampak otonomi daerah dan demokrasi lokal terhadap kesejahteraan. Padahal, secara konseptual, desentralisasi merupakan salah satu alat yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan karena dengan desentralisasi, masyarakat di daerah memiliki informasi dan insentif untuk mendesain dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang merespon kebutuhan-kebutuhan local (Mariana, 2007).

Terkait masalah desentralisasi, pembangunan, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memiliki Visi dan Misi 2013-2018 yaitu “**Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua**”. **Maju** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang produktif, berdaya

saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan serta berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial. **Sejahtera** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. Sedangkan **Untuk Semua** berarti kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat (RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018).

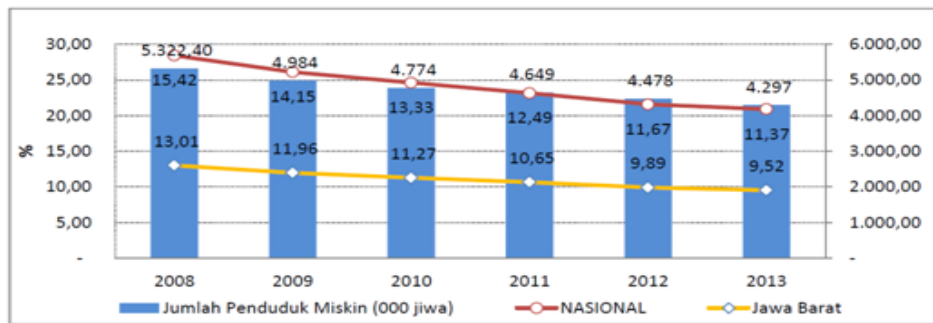
Beberapa masalah yang masih dihadapi oleh Jawa Barat diantaranya masalah otonomi dan demokrasi lokal, lemahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, profesionalisme aparatur, hubungan industrial, perlindungan social dan kesejahteraan bagi wanita dan anak-anak, serta keterbukaan informasi publik.

Kinerja Pemprov Jabar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokrasi lokal, salah satunya diukur dari indikator pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM Jawa Barat tahun 2014 mencapai 74,28, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat, 2014). Selain IPM, Jawa Barat pada tahun 2013 dinilai sebagai provinsi yang mengalami kenaikan indeks demokrasi dari 57,05 pada tahun 2012 menjadi 65,18 pada tahun 2013, meskipun indeks demokrasi Jawa Barat masih jauh di bawah rata-rata indeks demokrasi nasional sebesar 77,94. Penilaian indeks demokrasi merujuk pada tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil, aspek pemenuhan hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi.

Sedangkan angka kemiskinan masyarakat Jawa Barat, dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Angka kemiskinan penduduk Jawa Barat pada tahun 2013 mencapai 9,52 persen (BPS, 2013), dan pada tahun 2014 turun menjadi 9,44 persen, dibawah angka kemiskinan nasional sebesar 11,37 persen. Laporan Bappenas (2014) juga menunjukkan bahwa angka tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat umumnya lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Selain itu di Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah korban perdagangan manusia khususnya anak dan perempuan terbanyak di Indonesia, mengindikasikan rendahnya perlindungan terhadap kedua kelompok rentan tersebut. Untuk lebih

jelasan data tentang angka kemiskinan Jawa Barat dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan
Provinsi Jawa Barat terhadap Nasional Tahun 2008-2013



Sumber: BPS, Tahun 2013

Data di atas memang menunjukkan kondisi positif dari hasil pembangunan Jawa Barat. Namun demikian, Jawa Barat masih tergolong sebagai provinsi dengan angka kemiskinan absolut tinggi. Berdasarkan data BPS 2014, angka kemiskinan absolut di Jawa Barat mencapai 4,2 juta jiwa¹, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.
Provinsi dengan Angka Kemiskinan Absolut Tinggi di Indonesia

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
Jawa Timur	4,7
Jawa Tengah	4,6
Jawa Barat	4,2
Sumatera Utara	1,4
Lampung	1,1

Sumber : BPS, per September 2014

Masih tingginya angka kemiskinan absolut di Jawa Barat dan indeks demokrasi (–meskipun mengalami peningkatan–) yang masih berada di bawah angka nasional menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan dan proses demokratisasi di Jawa Barat belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang dialami Jawa Barat, meski angka

¹ Jumlah penduduk miskin versi Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat sebesar 4,32 juta jiwa

kemiskinan absolutnya lebih rendah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, namun bila dibandingkan dengan jumlah masing-masing penduduk menunjukkan angka relatif yang tinggi, antara lain: 4,2 juta dari 46,5 juta penduduk Jawa Barat yang miskin absolut artinya hampir 9,0% penduduk Jabar mengalami kemiskinan absolut, di Jawa Timur 3,7 juta dari 37,4 juta penduduk Jatim artinya 9,9% mengalami kemiskinan absolut dan Jawa Tengah 4,6 juta dari 32,3 juta penduduk Jateng, artinya 14,2% yang mengalami kemiskinan absolut (BPS, 2015).

Persoalan atau tantangan Jawa Barat lainnya terkait pentingnya peran strategis para pelaku hubungan industrial (pengusaha, pemerintah dan buruh) dalam konteks pembangunan, khususnya membangun model komunikasi yang dialogis, harmonis dan terbuka dalam rangka mewujudkan hubungan industrial (tripartite) yang berkelanjutan dan menyejahterakan dalam era demokratisasi. Seringkali komunikasi di antara para aktor dalam relasi produksi terganggu dengan berbagai kepentingan yang sulit untuk melakukan musyawarah. Frekuensi unjuk rasa yang relatif tinggi yang dilakukan para buruh di Jawa Barat, merupakan satu indikator yang serius dalam membangun hubungan harmonis di antara para pelaku industri. Demokratisasi yang dimaknai sebagai kebebasan para buruh untuk melakukan unjuk rasa semata sangat mengganggu produktifitas usaha.

Selain isu peran demokrasi terhadap kesejahteraan, transparansi pemerintahan juga menjadi sorotan dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Transparansi merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada publik. Pemprov Jabar memberikan akses yang luas kepada masyarakat Jawa Barat untuk memperoleh informasi tentang kegiatan tata kelola pemerintahan yang menyangkut kehidupan publik melalui pembentukan Komisi Informasi tingkat Provinsi dan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). Adanya Komisi Informasi maupun PPID menunjukkan keseriusan Pemprov Jabar dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka dan akuntabel.

Salah satu pemicu belum tercapainya praktik demokrasi dan kesejahteraan di Jawa Barat adalah masih rendahnya kinerja dan profesionalisme aparatur daerah. Kinerja pemerintah daerah selama ini belum diaudit secara obyektif dan ilmiah sehingga sulit menetapkan Status Kinerja Pemerintah Daerah.

Untuk itu perlu dilakukan Audit Kinerja Pemerintah Daerah khususnya terhadap Profesionalisme Aparatur dan penguatan kelembagaan lokal untuk memantau dan mengidentifikasi ada tidaknya perubahan pada sistem dan praktik manajemen pemerintahan daerah melalui survei audit kinerja pemerintah daerah (profesionalisme aparatur) dengan menggunakan instrumen audit kinerja aparatur pemerintah daerah.

Terkait demokrasi dan kesejahteraan sebagaimana dipaparkan di atas, maka masalah pokok penelitian ini adalah mengapa demokrasi yang dipraktikan di Indonesia baik di aras nasional maupun lokal belum membuahkan kesejahteraan, bagaimanakah keterkaitan antara demokrasi dan kesejahteraan tersebut. Karena itu penelitian ini secara rinci hendak melakukan review pelaksanaan demokrasi, mengidentifikasi peran demokrasi terhadap kesejahteraan, memetakan berbagai faktor penyebab capaian demokrasi maupun kesejahteraan pada levelnya saat ini, serta merekonstruksi kembali gagasan dan praktik demokrasi dan kesejahteraan di Jawa Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dari masalah pokok penelitian dirumuskan secara rinci pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan demokrasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik, perlindungan sosial, dan pelaksanaan hubungan industrial di Jawa Barat?
2. Bagaimana hasil-hasil pelaksanaan demokrasi dan kondisi kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Jawa Barat?
3. Bagaimana Audit Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Profesionalisme Aparatur dan penguatan kelembagaan lokal ?
4. Bagaimana peran demokrasi terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat?
5. Faktor-faktor apa yang telah berkontribusi dan berpengaruh atas capaian demokrasi dan kesejahteraan saat ini?
6. Bagaimana rekonstruksi praktik demokrasi dan kesejahteraan yang harus dibangun agar dapat mewujudkan kesejahteraan di Jawa Barat?

1.3. Tujuan Umum dan Khusus Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara praktik demokrasi dengan kesejahteraan di suatu daerah otonom. Sedangkan tujuan khusus secara rinci sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan demokrasi, implementasi keterbukaan informasi publik, perlindungan sosial dan pelaksanaan hubungan industrial di Jawa Barat.
2. Mengetahui hasil-hasil pelaksanaan demokrasi dan kondisi kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Jawa Barat.
3. Mengetahui Audit Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Profesionalisme Aparatur dan penguatan kelembagaan lokal ?
4. Mengidentifikasi peran demokrasi terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
5. Mengetahui faktor-faktor apa yang telah berkontribusi dan berpengaruh atas capaian demokrasi dan kesejahteraan saat ini.
6. Melakukan rekonstruksi praktik demokrasi dan kesejahteraan yang harus dibangun agar dapat mewujudkan kesejahteraan di Jawa Barat.

1.4. Manfaat dan Urgensi Penelitian

Manfaat dan urgensi penelitian ini meliputi manfaat dan urgensi akademis serta manfaat dan urgensi praktis, sebagai berikut:

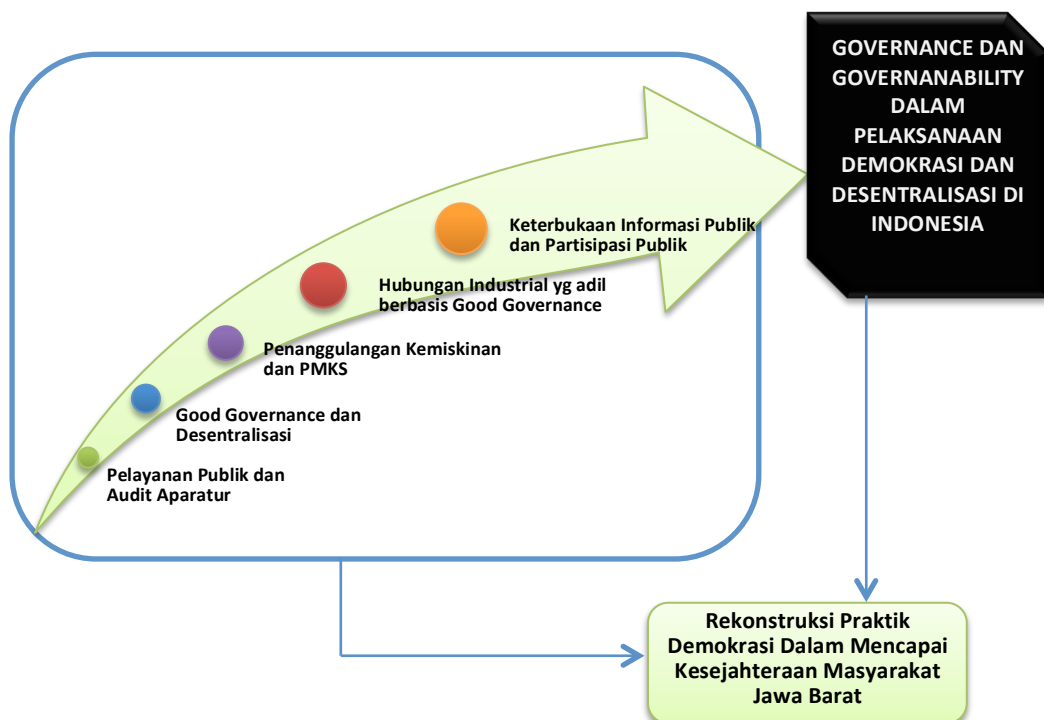
1.4.1. Manfaat dan Urgensi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pengembangan ilmu khususnya bagi pengembangan ilmu politik, ilmu pemerintahan, administrasi publik, kesejahteraan sosial, dan hubungan masyarakat berkenaan konsep pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah dalam konteks demokrasi, desentralisasi, transparansi, komunikasi dan kesejahteraan sosial. Konsep yang akan dikembangkan adalah pengembangan model teoritik dan praktik demokrasi dan pembangunan yang mampu mewujudkan kesejahteraan di daerah otonom.

1.4.2. Manfaat dan Urgensi Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai praktik-praktik demokrasi khususnya di dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan profesionalisme birokrasi, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sebagaimana visi dan misi Jabar 2013-2018 mewujudkan Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua.

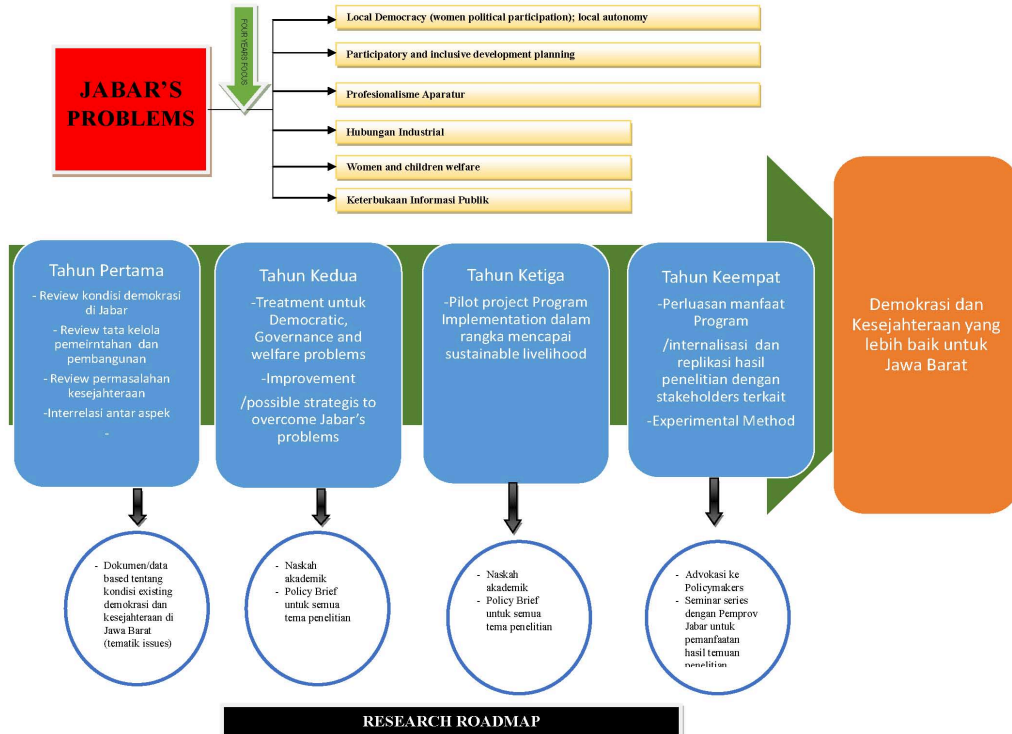
Gambar 1.2
Kaitan dengan Payung Penelitian Fakultas



Gambar 1.3
Kaitan dengan Pilar Penelitian
Unpad / Common Goals



Gambar 1.4
Roadmap Penelitian Rekonstruksi Praktik Demokrasi Dalam Mencapai
Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Desentralisasi dan Demokrasi dalam Pembangunan

Lahirnya konsep desentralisasi sebagai respon dari pemberlakuan sistem pemerintahan sentralistik yang dinilai tidak efisien. Diyakini bahwa sistem yang terdesentralisasi berpotensi lebih kreatif jika dibandingkan sistem yang tersentralisasi. Adanya keragaman unit pemerintahan, dimana masing-masing memberikan respon terhadap kebutuhan dan tuntutan daerah yang berbeda-beda akan cenderung menghasilkan kebijakan yang beragam pula. Desentralisasi akan menciptakan peluang-peluang yang lebih besar bagi inovasi dan eksperimen, serta bagi proses pembelajaran dan proses difusi dari eksperimen kebijakan yang baik. Hal tersebut akan memudahkan terciptanya aktivitas pemerintahan yang lebih efektif karena ada struktur koordinasi di daerah (Cheema dan Rondinelli, 1983:6). Litvack, Achmad dan Bird (1998: 1) mencatat bahwa pembangunan daerah merupakan alasan umum yang dipakai di seluruh dunia untuk mendukung pengalihan kontrol politik, administratif dan fiskal kepada level pemerintahan yang lebih rendah.

Menurut The Liang Gie (1968:35-41) alasan-alasan diantarnya desentralisasi, sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani;
2. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat;
3. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya;

4. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Penerapan desentralisasi memberikan manfaat baik secara teoretis maupun empiris. Secara teoretis, desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu : pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Mardiasmo, 2002: 6). Pada tataran empiris, desentralisasi terbukti berhubungan positif dengan kualitas pemerintahan. Hasil penelitian Huther dan Shah (1998) menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan yang merupakan variabel gabungan dari partisipasi masyarakat, orientasi pemerintah, pembangunan sosial, dan manajemen ekonomi berhubungan positif dengan derajat desentralisasi. Semakin tinggi derajat desentralisasi yang ada di suatu negara semakin baik pula partisipasi masyarakatnya, orientasi pemerintah, pembangunan sosial, dan manajemen ekonomi.

Menurut Cheema dan Rondinelli (1983:14-16), terdapat beberapa alasan rasional dengan menerapkan desentralisasi, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah dalam hal perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Melalui desentralisasi, akan meningkatkan kontak antara pemerintah dengan masyarakat yang memungkinkan kedua belah pihak saling bertukar informasi agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih realistis . Dengan desentralisasi juga memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik dan sosial (etnis, gender dan keagamaan) di dalam perencanaan pembangunan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah. Desentralisasi juga dapat menghantarkan kepada administrasi pemerintahan yang inovatif dan kreatif. Melalui desentralisasi, perencanaan dan fungsi manajemen dapat memungkinkan pemimpin di daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah-tengah masyarakat.

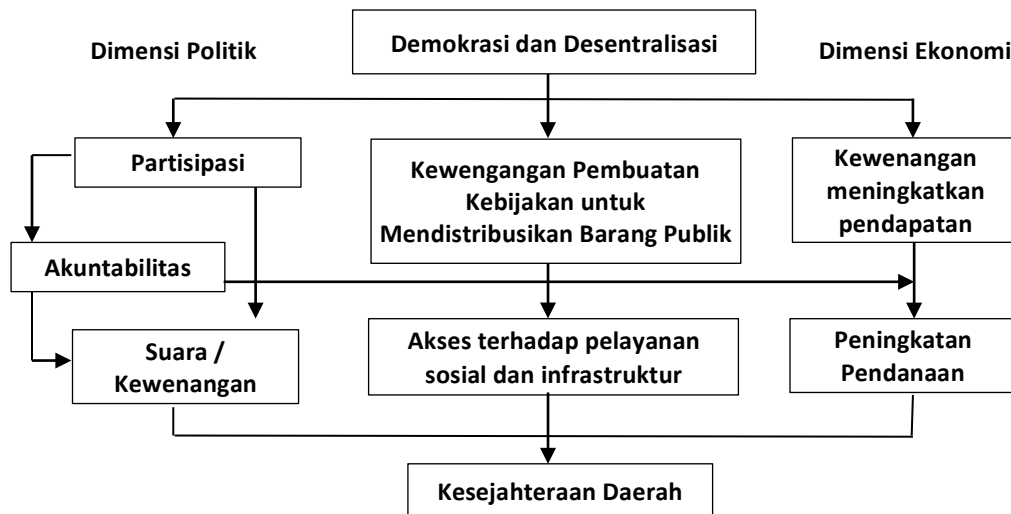
Talcott Parsons dan Edward Shills (1951, dalam Suparlan, 1999:8) menyatakan proses-proses sosial yang terwujud sebagai tindakan sosial pada dasarnya bertujuan untuk dapat saling bekerja sama di antara para pelaku yang merupakan warga masyarakat. Proses-proses sosial mempunyai fungsi yang menekankan tujuan terwujudnya kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang bercorak keseimbangan atau ekuilibrium di antara unsur-unsurnya, sehingga menghasilkan adanya integrasi sosial dan kemasyarakatan.

2.2. Demokrasi dan Kesejahteraan Daerah

Tumbuhnya demokrasi di tingkat lokal ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitasnya kepada publik. Dengan peluang-peluang ini, maka masyarakat daerah bisa mendapatkan akses terhadap pelayanan publik termasuk skema perlindungan sosial yang meningkatkan ketahanan dan mengurangi resiko sosial ekonomi kelompok rentan. . Secara ekonomis, desentralisasi memiliki dampak yang kuat dan positif terhadap perwujudan kesejahteraan melalui peningkatan efisiensi dan keakuratan penerima layanan publik. Efisiensi dalam pelayanan publik secara langsung dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, air, perumahan, dan listrik. Pendelegasian kekuasaan dan sumber daya kepada daerah juga dapat memudahkan pendataan penduduk miskin. Semakin terdesentralisasi kerangka kerja dalam mengidentifikasi dan memonitor program-program dan kegiatan-kegiatan tidak hanya membantu mengurangi biaya, tetapi juga bisa menjangkau masyarakat yang selama ini termarginalkan. Di samping itu, desentralisasi mampu meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerahnya (Gilbert & Terrel, 2012).

Pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua skema untuk membangun kesejahteraan. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat menerapkan reformasi pelayanan publik dan kebijakan pembangunan sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, kesejahteraan yang berkelanjutan memerlukan dukungan sinergi antara negara (pemerintah), swasta, dan masyarakat melalui reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Kerangka model kesejahteraan daerah yang diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Model Kesejahteraan Daerah



Sumber : Mariana (2007), modifikasi dari Steiner (2005) dan Jutting, et al (2004)

Pemerintah daerah, sebagai representasi negara, dapat bermitra dengan swasta untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat daerah dalam menggerakkan ekonomi rakyat untuk menciptakan pemerataan. Pembangunan politik yang mengarah pada perpaduan antara demokrasi dan kesejahteraan merupakan model kausalitas yang dipengaruhi oleh sejumlah prakondisi. Legitimasi demokrasi dalam arti dukungan publik pada demokrasi ditentukan oleh konteks historis; tipe rezim yang berkuasa sekarang; pelembagaan institusi demokrasi; serta struktur sosial (Diamond, 2001).

Upaya menyandingkan demokrasi dengan kesejahteraan mensyaratkan penguatan pada 4 (empat) basis, yakni: basis politik; basis birokrasi; basis tata kelola pemerintahan; serta basis pembiayaan dan kerangka ekonomi makro (Triwibowo dan Bahagijo, 2007). Basis politik yang kuat diperlukan untuk mewadahi koalisi antar kelompok kepentingan serta dukungan demokrasi perwakilan yang matang. Faktor kepemimpinan menjadi penting untuk membangun komitmen politik yang kuat terhadap reformasi birokrasi, pembangunan daerah, dan kesejahteraan. Komitmen politik ini akan menjadi modal politik yang penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan legitimasi dari DPRD, partai politik, birokrasi, pelaku usaha, dan kelompok-kelompok masyarakat. Basis birokrasi diindikasikan oleh kapasitas birokrasi yang kuat, sebagai bentuk organisasi modern yang efektif dan efisien, untuk

mengadministrasikan jejaring kebijakan sosial yang komprehensif. Basis tata kelola pemerintahan menyangkut penyiapan transfer kewenangan, realokasi sumberdaya finansial dan sistem pengambilan keputusan yang terbentuk melalui desentralisasi. Basis pembiayaan dan kerangka makro ekonomi diperlukan untuk menjamin keberlanjutan perubahan dan pembaharuan dalam sistem pemerintahan.

Keempat basis prakondisi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola regulasi, konsumsi, ekstraksi, investasi, dan distribusi. Kapasitas ini secara teoretis dapat dilihat dari sisi luaran (*output*), kinerja, dan keberlanjutan. Secara khusus, keberlanjutan mencakup dua persoalan, yakni kelembagaan (komitmen, kebijakan, dan regulasi) dan dukungan keuangan. Untuk mencapainya, dalam jangka pendek diperlukan pengelolaan data yang akurat, perencanaan anggaran yang berbasis kinerja, kerangka kelembagaan yang lebih pasti, serta penerapan pendekatan *targeting* yang memprioritaskan penduduk miskin.

Skema tersebut menegaskan bahwa pemerintah bukan aktor tunggal dalam mewujudkan kesejahteraan di daerah. Masyarakat juga bukan semata sebagai obyek program pembangunan yang pasif, melainkan juga berperan penting dalam transformasi kesejahteraan. Karena itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat, yang ditunjukkan pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta keseimbangan antara negara dan warga.

Pembangunan politik yang berbasis demokrasi mengarahkan pada pelembagaan demokrasi melalui penerapan etika dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pengembangan kapasitas institusi politik, khususnya dalam hal pelembagaan peran partai politik dan *civil society*. Etika politik yang perlu dibangun mensyaratkan bahwa dinamika pemerintahan harus diletakkan dalam kerangka perjanjian (konsensus/kontrak sosial) antara orang yang memerintah dengan orang yang diperintah. Komitmen ini diwujudkan dengan konsolidasi yang tidak meliputi kesepakatan pada aturan yang melandasi kompetisi dalam meraih kekuasaan, tetapi juga aturan-aturan pembatas yang ditegakkan dalam penerapan kekuasaan. Konsensus ini seyogianya berawal pada saat mekanisme rekrutmen politik berlangsung. Mulai dari rekrutmen kader partai politik, seleksi bagi calon anggota legislatif, hingga seleksi bagi calon kepala daerah/wakilnya dan calon presiden/wapres. Bentuk konkret dari konsensus ini tercermin dalam

nilai-nilai yang dijadikan standar dalam rekrutmen politik, baik nilai-nilai normatif (yuridis/legal) maupun nilai-nilai moral dan etika. Dalam konsepsi demokrasi perwakilan, keberadaan institusi-institusi seperti partai politik dan *civil society* berperan penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat.

Menyangkut peran birokrasi dalam demokratisasi, basis birokrasi yang profesional diperlukan untuk mendukung pelebagaan demokrasi karena tanpa profesionalitas, birokrasi justru akan menjadi beban yang berat bagi daerah. Birokrasi selama ini cenderung menjadi institusi yang lebih banyak menghabiskan ketimbang menghasilkan. Sektor birokrasi menjadi penyebab delegitimasi birokrasi pemerintah di mata masyarakat. Untuk mendukung pelebagaan demokrasi, birokrasi pemerintah harus memiliki bakat dan pelatihan teknis yang memerlukan birokrasi meritokrasi profesional dengan gaji yang relatif baik, standar-standar rekrutmen yang kompetitif, dan idealnya terdapat semangat korps (Diamond, 2001).

Negara yang menganut sistem demokrasi, mengakui hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagai sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan semua badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya (Subagiyo, dkk, 2009: 4).

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (*open government*).

2.3. Kerangka Pemikiran

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan desentralisasi dan memiliki peran utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa manfaat dari pelaksanaan desentralisasi. Manfaat tersebut dibagi dalam 4 dimensi, yakni :

1. Dimensi ekonomi dimana daerah otonom memiliki keleluasaan memberdayakan dan mengelola sumber-sumber daya bagi peningkatan pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
2. Dimensi pemerintahan yakni kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada daerah memberikan peluang terciptanya aktivitas pemerintahan yang efektif, inovatif dan kreatif.
3. Dimensi politik, memberikan peluang bagi perluasan partisipasi publik untuk ikut serta dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan, mendukung program pemerintah serta melakukan kontrol publik terhadap pengelolaan pemerintahan.
4. Dimensi budaya, memberikan keleluasaan pengelolaan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan keragaman daerah dan nilai-nilai kearifan lokal.

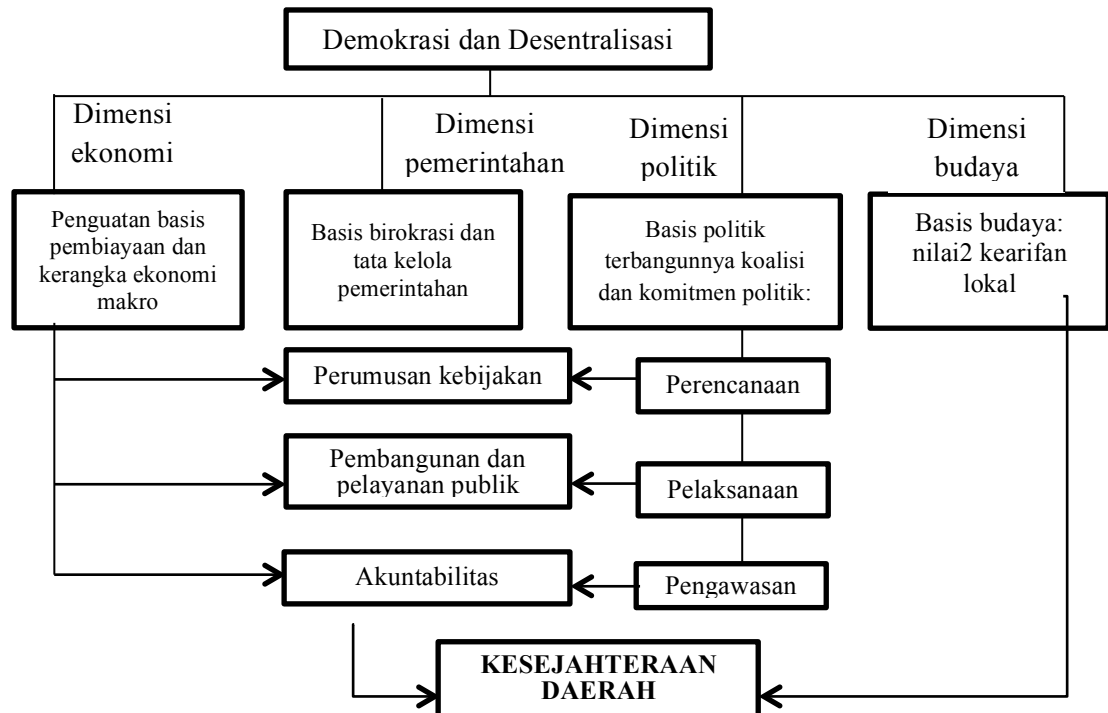
Desentralisasi memiliki tujuan akhir yakni mewujudkan kesejahteraan di daerah, Jawa Barat memiliki visi dan misi 2013-2018 yakni mewujudkan Jawa Barat yang Maju dan Sejahtera untuk Semua. Namun mewujudkan visi dan misi tersebut melalui pelaksanaan pembangunan semata tidaklah mudah, melainkan membutuhkan langkah-langkah strategis dengan tidak mengabaikan mekanisme demokrasi di tingkat lokal.

Menyandingkan demokrasi dengan kesejahteraan mensyaratkan penguatan pada 4 (empat) basis utama, yakni: basis politik; basis birokrasi; basis tata kelola pemerintahan; serta basis ekonomi (pembiayaan dan kerangka ekonomi makro).

Basis politik yang kuat diperlukan untuk mewadahi koalisi antar kelompok kepentingan serta dukungan demokrasi perwakilan yang matang. Basis birokrasi diindikasikan oleh kapasitas birokrasi yang kuat, sebagai bentuk organisasi modern yang efektif dan efisien, untuk mengadministrasikan jejaring kebijakan sosial yang komprehensif.

Keempat basis tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam perumusan regulasi, pengelolaan sumber-sumber daya dan investasi (fungsi ekstraksi), serta distribusi akses pelayanan dan hasil pembangunan kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata. Namun penguatan empat basis tersebut tidak

akan berarti apabila mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal, karena salah satu alasan rasional diterapkannya desentralisasi karena kebutuhan masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan tercipta keragaman lokal. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka model analisis berfikir pada penelitian ini dituangkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.2.
Model Analisis Berfikir

2.4. Proposisi Penelitian

Berdasarkan hasil telaah teoritik dan kerangka pemikiran yang dibangun, maka dirumuskan proposisi penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan demokrasi di Jawa Barat dapat diukur dari terbangunnya koalisi kelompok kepentingan dan komitmen politik yang menjamin perluasan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pemerintah dalam melaksanakan keterbukaan informasi public, meningkatkan perlindungan social dan membangun hubungan industrial yang harmonis.
2. Pemetaan hasil-hasil demokrasi dan kesejahteraan dapat dilihat dari perluasan partisipasi publik dan kemampuan pemerintah daerah dalam

meningkatkan pendapatan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

3. Demokrasi berperan pada kesejahteraan apabila dapat masyarakat mengakses pelayanan publik dan merasakan hasil-hasil pembangunan secara adil dan merata.
4. Faktor-faktor yang berkontribusi dan berpengaruh atas capaian demokrasi dan kesejahteraan saat ini adalah kemampuan pembiayaan pemerintah, birokrasi yang professional, terbangunnya koalisi, dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal.
5. Gagasan praktik demokrasi dan kesejahteraan dapat dibangun kembali (rekonstruksi) melalui penguatan empat dimensi ekonomi, pemerintahan, politik dan budaya untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Metode yang digunakan ini adalah metode penelitian kualitatif. Pada penelitian berusaha menjelaskan (eksplanasi) secara rinci dan melakukan analisis mendalam terkait kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan penguatan kelembagaan lokal dalam mewujudkan kesejahteraan di daerah. Penggunaan metode penelitian kualitatif dianggap tepat karena menggunakan kekuatan nalar atas fenomena empirik yang tidak hanya melihat dari satu faktor, namun melibatkan banyak faktor yang dapat menjelaskan berbagai hal mengenai terbentuknya kesejahteraan di daerah.

3.2. Unit Analisis

Unit analisis dari penelitian ini adalah lembaga yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kelembagaan lokal. Adapun objek penelitiannya adalah kemampuan pemerintah dan koalisi kepentingan dan komitmen politik lembaga politik lokal yang berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pemerintahan dalam rangka mewujudkan daerah kesejahteraan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data/informasi yang diperoleh langsung dari informan/narasumber yang memahami masalah penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dan *Focussed Group Discussion* (FGD). Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk data angka atau fakta. Data sekunder dapat diperoleh dari laporan kegiatan Pemprov Jabar, dokumentasi rapat dengan anggota dewan, telaah staf, telaah peraturan-peraturan, analisis media, dan lain sebagainya.

3.4. Teknik Analisis dan Pengujian Keabsahan Data

Pada metode penelitian kualitatif analisis data pada umumnya dilakukan secara *ongoing* sepanjang proses pencarian data dan penelitian itu berlangsung. Hal ini berarti analisis data dilakukan selama proses penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dilakukan. Untuk melakukan analisis data digunakan dua sumber utama yaitu pertanyaan penelitian (evaluasi) yang telah dirumuskan dan wawasan analitis serta penafsiran yang muncul selama pengumpulan data. Serta analisis dan penafsiran berdasarkan fokus spesifik berdasarkan informasi dari seluruh informan kunci dan sumber data lainnya.

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga alur kegiatan utama yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dari analisis tersebut, penulis melakukan penafsiran data pada penelitian yang tidak semata-mata bertujuan deskripsi semata-mata, melainkan penulis akan mencoba melakukan eksplanasi (penjelasan), dengan cara mengembangkan analisis lebih lanjut atas deskripsi umum penelitian.

Dalam hal pengujian keabsahan data, secara spesifik sebagaimana disarikan dari Creswell (2002:156-157), tahapan-tahapan pengujian keabsahan data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara :

1. Triangulasi data dan sumber, data yang telah terkumpul melalui wawancara dari berbagai sumber informan yang berbeda baik dari kelompok aparatur pemerintah, masyarakat, kelompok kepentingan, dan pakar yang memahami masalah penelitian. Triangulasi juga dilakukan melalui berbagai

pengamatan, dan analisa dokumen sehingga akan ditelaah pola keterhubungannya.

2. Pemeriksaan oleh anggota atau informan (*member check*) yang berperan sebagai pemeriksa sepanjang proses analisa untuk menggambarkan kejujuran data yang diberikan.
3. Pengamatan jangka panjang dan berulang di lokasi penelitian.
4. Pemeriksaan oleh rekan sejawat.

BAB IV BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN

4.1. Anggaran Biaya

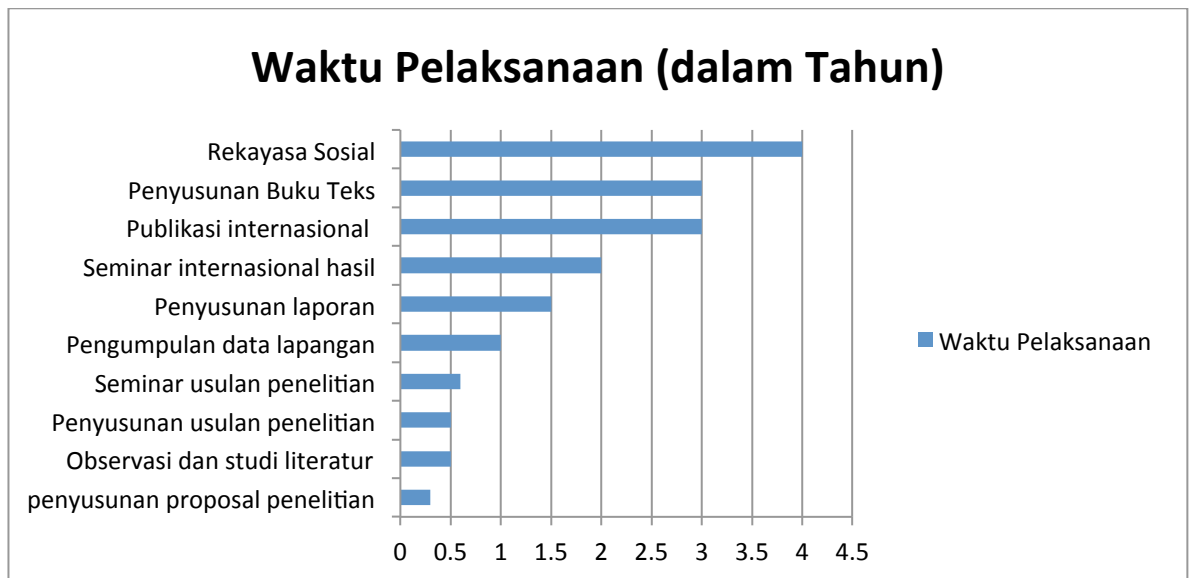
Anggaran penelitian secara rinci dapat dilihat pada lampiran proposal ini. Adapun ringkasan anggaran berdasarkan komponen biaya penelitian dapat dilihat pada table sebagai berikut

Tabel 4.1
Ringkasan Anggaran Biaya Program *Academic Leadership Grant*

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp.) dlm ribuan			
		Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4
1	Gaji dan Upah	74.700	74.700	74.700	74.700
2	Bahan habis pakai dan peralatan	37.950	37.950	37.950	37.950
3	Perjalanan	62.350	62.350	62.350	62.350
4	Lain-lain: dokumentasi, publikasi, seminar, laporan	75.000	75.000	75.000	75.000
	Total:	250.000	250.000	250.000	250.000

4.2. Jadwal Penelitian

Jadwal rencana penelitian seperti tergambar pada tabel berikut:



DAFTAR PUSTAKA

- Cheema, Shabbir G., and Dennis A. Rondinelli,. 1983, *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Beverly Hills California: Sage Publication
- Cresswell, W, John. 2002. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions*, California: Sage Publications, Inc.
- Diamond, Larry. 2001. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press.
- Eko, Sutoro. 2007. “Dari Daerah Budiman menuju Daerah Sejahtera”. Dalam *Jurnal Mandatory*, Edisi 3 Tahun 3, Januari.
- Gie, The Liang. 1968. *Pertumbuhan Pemerintah Derah di Negara republic Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung
- Huther , Jeff and Anwar Shah. 1998. *A Simple Measure of Good Governance And Its Aplication to the Debate on The Appropriate Level of Fiscal Decentralization*. World Bank Policy Research Paper Series No. 1894, March 1998, Washington, DC: World Bank
- Imawan, Riswanda. 2003. “Masalah Etika dan Moralitas Partai-partai dalam Parlemen: Kasus Nasional dan Lokal”. *Makalah* yang disampaikan pada Workshop “Pemilihan Umum 2004: Etika Politik dan Krisis Kepemimpinan di Indonesia”, dalam rangka HUT KIPI ke-36 di Bandung, 14-15 Agustus.

- Kaho, Josef Riwu. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- , 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Radjawali Press
- Litvack, J, Achmad, J, dan Bird, R. 1998. *Rethinking Decentralisation in Developing Countries*, Washington D.C: The World Bank
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mariana, Dede. 2007. *Demokrasi dengan Kesejahteraan*, Makalah disampaikan pada Diskusi Panel RPJP Bidang Pemerintahan diselenggarakan oleh BAPPEDA Jawa Barat, 21 Agustus
- Smollar, Rodney. A. 1992. *Free Speech in an Open Society*, New York: Vintage Book
- Subagiyo, dkk, 2009. *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Edisi Pertama, Jakarta: Yayasan Tifa
- Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Thompson, Dennis F. 2002. *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Triwibowo, Dharmawan dan Sugeng Bahagijo. 2007. "Demokrasi dengan Kesejahteraan: Menguak Beberapa Mitos Negara Kesejahteraan dan Menimbang Relevansinya bagi Indonesia". Dalam *Jurnal Mandatory*, Edisi 3 Tahun 3, Januari.